

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan indikator yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah dan juga pendapatan daerah merupakan indikator yang dapat menentukan berhasil tidaknya kemandirian Kabupaten/Kota didalam otonomi daerah (Samsubar, 2003).

Pada umumnya suatu penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri (Mangkoesebroto, 2001).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari bidang Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong perkembangan serta pembangunan beberapa sektor perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata, meningkatkan industri-industri baru yang erat

halnya hotel dan restoran, meningkatkan perolehan devisa negara serta memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional.

Pariwisata adalah konsep umum yang sejarahnya kembali ke masa lampau (tahun 1811) atau sebelumnya, dan definisinya terus berubah. Suatu konsepsi mengenai pariwisata yang dapat dipergunakan sebagai pegangan untuk membangun industri, bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta pengunjung lainnya (Lundberg, 1997).

Menurut Muharomah (2006) yang perlu diketahui ada beberapa hal untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD:

- a. Kondisi awal suatu daerah
 - 1) Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan
 - 2) Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
- b. Peningkatan cakupan atau ekstensi dan intensifikasi penerimaan PAD
Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD
- c. Perkembangan PDRB per kapita riil

Berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan semakin tinggi pendapatan seseorang dan juga semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*).

d. Pertumbuhan penduduk

Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat, besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

e. Tingkat inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel.

f. Penyesuaian tariff

Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap, maka dalam penyesuaian tariff perlu mempertimbangkan laju inflasi, Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif.

g. Pembangunan baru

Pembangunan-pembangunan baru seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah juga dapat di peroleh untuk penambahan PAD.

h. Sumber pendapatan baru

Adanya suatu kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.

Misalnya usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer/internet dan lain-lain.

i. Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi jelas akan meningkatkan PAD.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Pasal 57 adalah hasil retribusi daerah. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a) Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pajak daerah adalah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah juga dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah melalui undang-undang.

b) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan

tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

- c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah sah

2. Penerimaan Pariwisata

Penerimaan pariwisata di dalam penelitian ini merupakan pendapatan dari pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah dari sektor pariwisata. Penerimaan pariwisata dalam penelitian ini bersumber dari pajak pembangunan, pajak tontonan/hiburan, retribusi obyek dan daya tarik wisata, retribusi perijinan, retribusi penggunaan aset Pemerintah Daerah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang dapat dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Jenis pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Dalam penelitian ini penerimaan daerah dari sektor pariwisata diperoleh dari pajak pembangunan dan pajak tontonan/hiburan.

1) Pajak Pembangunan

Pajak pembangunan merupakan pajak yang diperoleh dari adanya pembangunan-pembangunan bangunan baru. Tujuan pemungutan pajak pembangunan ini agar terciptanya pembangunan yang merata.

2) Pajak Tontonan/hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan Selain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Dengan demikian objek pajak hiburan itu meliputi pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata dan sejenisnya, pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya. Objek pajak hiburan merupakan suatu penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga

Pada pajak hiburan, sebyek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subyek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Daerah Provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis etribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yani, 2002).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005).

Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah karena secara teoriti terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan RI, 2004).

Obyek retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subyek retribusi daerah terdiri dari:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

1. Kepariwisataa

a. Pariwisata

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata. Dalam kepustakaan tentang kepariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataa

kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan seseorang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan disebut sebagai wisatawan.

Wisata adalah berpergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya. Wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata (Yoeti, 1996)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata
2. Perusahaan objek dan daya tarik wisata seperti kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni, budaya, tat kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah keindahan alam, gunung berapi, danau dan pantai.
3. Perusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, paramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, kosultan pariwisata,

informasi pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah, makan, bar, dan angkutan wisata.

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu (Spillane, 1987).

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu :

- 1) Harus bersifat sementara.
- 2) Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi paksaan.
- 3) Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka usaha memperbesar PAD, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kata pariwisata secara umum telah diterima sebagai terjemahan dari kata *tourism*, menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta dan terdiri dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti seluruh, semua dan penuh sedangkan *wisata* berarti perjalanan.

Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari sesuatu tempat, menuju dan singgah di suatu atau di beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal.

b. Jenis Pariwisata

Jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan dengan dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut (Spillane, 1987):

1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam dan mendapatkan kedamaian.

2) Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata sebagai rekreasi dilakukan untuk pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani dan untuk menyegarkan keletihan.

3) Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata untuk kebudayaan merupakan suatu serangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monument bersejarah dan peninggalan purbakala dan ikut festival seni music.

4) Pariwisata untuk olahraga (*Sport Tourism*)

Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata olahraga besar seperti Olimpiade, *Asian Games*, dan *SEA Games* serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.

5) Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Pariwisata untuk urusan usaha dagang umumnya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

6) Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan dengan konferensi, symposium, siding dan seminar intrernasioanal.

4. Industri Pariwisata

Kegiatan pariwisata adalah suatu kegiatan berkenaan dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk memperoleh kesenangan. Kesenangan itu bisa dinikmati dan bisa dirasakan berkat adanya jasa yang diberikan oleh pihak tertentu. Pariwisata itu sendiri merupakan suatu industri Sesuai dengan istilahnya, pengertian industri adalah *The quality of working hard, the production of goods, the creation of wealth by human efforts*(Hornby, 1978).

Kegiatan industri dalam pariwisata itu memerlukan kerja keras agar berhasil, yang akan memberikan kepuasan dan kesejahteraan kepada manusia. Oleh karena itu kata industri senantiasa mengandung pengertian

suatu usaha yang menghasilkan produk. Produk wisata adalah rangkaian jasa-jasa yang mempunyai segi ekonomis, sosial dan psikologis. Produk wisata dapat dihasilkan oleh berbagai perusahaan seperti jasa horel, jasa angkutan, jasa hiburan, jasa penyelenggraan tour dan sebagainya. Disediakan oleh masyarakat antara lain jalanan dan keramah tamahan rakyat, Disediakan oleh alam seperti pemandangan alam, pantai, lautan dan sebagainya. Jasa-jasa itu merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang disebut “*Package*” (Hamalik, 1978).

Produk wisata itu terdiri dari dua jenis yaitu keduanya saling melengkapi, yakni segi yang menyangkut produk-produk dari pengusaha-pengusaha lain dan segi yang menyangkut faktor-faktor keaslian alam dan tingkah laku manusia. Semuanya saling bergantung dan tidak boleh jelek salah satu karena bisa mengakibatkan kejelekan pula pada segi yang lain (Prajogo, 1976).

a. Ciri-Ciri Produk Wisata

Ciri-ciri produk wisata tersendiri dari dan berbeda dengan produk industri yang lain. Adapun yang menjadi ciri-ciri produk wisata adalah sebagai berikut:

- 1) Tak dapat dipindahkan wisatawan harus datang sendiri untuk menikmati dan mengalami produk tersebut.

- 2) Produk dan konsumsi terjadi pada saat yang sama, artinya produk itu terjadi pada waktu langganan itu sedang menggunakan jasa-jasa tersebut.
- 3) Tidak ada suatu standard tertentu secara objektif, karena jasa pariwisata mempunyai berbagai ragam bentuk.
- 4) Langganan tidak dapat mencicipi atau mengetahui dan menguji produk itu sebelumnya, kecuali melihat gambar-gambar saja dengan penjelasannya.
- 5) Produk wisata merupakan usaha yang mengandung resiko besar bersifat elastic, kalau terjadi perubahan situasi ekonomi, politik, sikap masyarakat yang menurun maka dapat menggoyahkan sendi-sendi penanaman modal usaha kepariwisataan, terjadinya kemunduran yang deras akan mempengaruhi pula industri menunjang wisata (Hornby, 1978).

Dengan demikian jelaslah bahwa industri pariwisata itu adalah suatu proses kegiatan ekonomi di bidang kepariwisataan yang produknya berupa jasa-jasa (*services*) untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara *compartable* (menyenangkan), *privacy* (betah karena tidak terganggu) dan *security* (terjamin keamanan pribadi) sehingga wisatawan kerasan (Prajogo, 1976).

Unsur-unsur kesenangan, kebetahan dan keyamanan bagi wisatawan perlu mendapat perhatian dan jaminan yang sungguh-sungguh, karena unsur ini sangat erat hubungannya dengan motif-motif psikologis

dari wisatawan itu. Kalau terjadi dimana wisatawan merasa tidak senang atas pelayanan yang diberikan maka akibatnya ia tidak akan betah tinggal di suatu tempat. Demikian pula kalau keamanan pribadinya merasa tidak terjamin maka sudah tentu ia tidak akan senang dan tidak akan betah. Akibat berikutnya ialah untuk waktu selajutnya ia tidak akan mau lagi mengikuti program wisata.

b. Cabang-cabang Industri Pariwisata

Industri pariwisata terdiri dari tiga macam sarana yaitu:

1. Sarana Pokok (*Main Tourism Supra Structure*).
2. Sarana Pelengkap (*Suplementing Tourism Supra Structure*).
3. Sarana Penunjang (*Supporting Tourism Supra Structure*) (Hamalik, 1978).

Yang dimaksud dengan sarana pokok adalah perusahaan-perusahaan yang kelangsungannya hidupnya terhangantung pada ada atau tidaknya wisatawan, yang dimaksud di dalamnya adalah *Travel Agencis, Tourist Transportation, Accomodation/Hotel*, dan lainnya, *Catering Trade, Tourist Objects, Souvenir*. Sedangkan saran pelengkap adalah perusahaan-perusahaan yang melengkapi sarana pokok, yang berfungsi membuat para wisatawan senang, betah, kersan, hingga mereka ingin tinggal lebih lama pada suatu tempat atau daerah yang termasuk kategori ini antara lain *Swimingpoll, Tennis Court, Golf Course, Recreation Centre* dan lain sebagainya.

Sarana penunjang ialah perusahaan-perusahaan yang melengkapi sarana pokok dan pelengkap yang berfungsi tidak saja membuat wisatawan lebih lama tinggal atau berdiam pada suatu tempat atau daerah tetapi agar wisatawan yang bersangkutan juga bisa lebih nyaman serta bisa merasakan wisata yang memberikan dampak yang berbeda dan menyenangkan bagi wisatawan. Dalam kategori ini adalah *Night Club*, *Steambath*, *Casino*. Menurut uraian tersebut dapatlah ditemukan bahwa cabang-cabang industry pariwisata banyak sekali dan tentulah erat hubungannya satu sama lain. Tiap perusahaan akan dapat bekerja lebih efektif dan efisien apabila satu sama lain mengadakan hubungan kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

5. Hubungan Kepariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Disadari bahwa setiap potensi kepariwisataan berada di daerah, potensi kepariwisataan ini dapat menjadi objek wisata andalan yang mampu berkembang dan bertahan terus terpelihara dengan baik, tentu saja semua ini sangat ditentukan oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah terutama pemerintah daerah sesuai dengan otonomi yang dimilikinya.

Dalam iklim otonomi, dapat di ketahui pula seluruh potensi daerah baik dalam bentuk *khazanah* budaya dan sejarah bangsa, adat istiadat dan lain-lain, dapat dikemas dengan baik melalui wahana pariwisata, karena pariwisata dapat kesatuan bangsa, sehingga bisa dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bersatu dan mandiri. Selain itu di era otonomi, pariwisata dapat berperan dalam mewujudkan keadilan dibidang ekonomi,

melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah secara optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, restoran dan penyelenggaraan paket wisata, banyak kegiatan ekonomi lainnya yang berhubungan dengan pariwisata, sebagai transportasi, telekomunikasi, dan bisnis eceran.

6. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah

Dalam undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) Pendapatan asli daerah yaitu, (i) hasil pajak daerah,(ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (b) dana perimbangan, (c) pinjaman daerah, (d) lain-lain pendapatan yang asli. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang di miliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang di tuangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu duharapkan peningkatannya. Hasil penelitian yang dilakukan Roerkaerts dan Savat (Spillane,1987) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah:

- a. Menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cindar mata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat di tingkatkan.
- b. Membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut.
- c. Menambah devisa negara, semakin banyaknya wisatawan yang datang, maka semakin banyak devisa yang diperoleh.
- d. Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah di DIY.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor

Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat

1. Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya yang penting perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi. *Pacific Travel Association* memberi batasan bahwa wisatawan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri asalnya, wisatawan ini meliputi:

- 1) Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi, keperluan kesehatan dan sebagainya
- 2) Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk pertemuan, konferensi, musyawarah atau sebagai utusan dari instansi atau organisasi
- 3) Orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk bisnis
- 4) Pejabat pemerintah dan militer beserta keluarganya yang ditempatkan di negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan sebagai wisatawan.

Spillane (1987) membagi kategori wisatawan menjadi wisatawan dan pelancong. Wisatawan adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam sedangkan pelancong adalah pengunjung yang tinggal kurang dari 24 jam.

Menurut Qadarrochman (2010), semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanja tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut.

Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan ke DIY, maka pendapatan sektor pariwisata seluruh DIY juga akan semakin meningkat.

2. Jumlah Objek Wisata

Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam sertakeanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa bagi negara (Badrudin,2001). Membangun suatu obyek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah wisata tersebut. Obyek wisata umumnya

berdasarkan pada : pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2000).

PDRB di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (*income*) yang relative besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang untuk mebiayai perjalan wisata.

Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata di DIY.

- a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bers
- d. Objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
- e. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai

luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

- b) Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata tertinggi kedua setelah Bali memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, khususnya wisata budaya dan wisata alam. Dengan demikian, banyaknya jumlah objek wisata yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di DIY, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.

3. Jumlah Usaha Wisata

Jumlah usaha wisata dapat di artikan sebagai usaha jasa pariwisata yang di atau dalam undang-undang no 9 tahun 1990 tentang jenis usaha pariwisata, jumlah usaha wisata itu salah satu factor pendukung utama bagi para wisatawan yang ingin berwisata atau yang akan mengunjungi tempat wisata tersebut. Berbagai jenis usaha wisata yang bisa bermanfaat dan di butuhkan oleh para wisatwan tersebut meliputi hotel berbintang maupun hotel melati, pondok wisata, tempat penginapan, restaurant atau rumah makan, serta dari segi usaha jasa pariwisata itu sendiri di butuhkan seperti biro perjalan wisata atau travel, penyediaan tempat sewa mobil atau motor atau jasa rent car bagi para wisatawan, juga dari segi hiburan umum yang dapat menunjang kenyamanan bagi wisatawan seperti diskotik, live music, diving, padang golf, kolam renang, dan tempat hiburan atau rekreasi lainnya.

Pada dasarnya usaha wisata itu dapat memberikan suntikan dan atau pendapatan bagi sektor pariwisata di sebuah daerah karena semakin banyak nya usaha usaha wisata yang memiliki standar keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan serta usaha usaha wisata tersebut memiliki standar yang berkualitas maka dari banyak pula wisatawan yang menggunakan jasa jasa usaha wisata di daerah tersebut sehingga pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata juga semakin meningkat.

Dalam penelitian terdahulu oleh Widyaningrum (2013), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan dan jumlah obyek wisata terhadap pendapatan sektor pariwisata. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga variabel yaitu tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus.

4. Pajak Usaha Wisata

Menurut UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan UU No.18 tahun 1997 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salahsatu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dilakukan oleh individu atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat paksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata atau usaha wisata ini merupakan salah satu indikator penunjang sebuah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata seperti kita ketahui pajak tersebut merupakan faktor pendukung dari sebuah daerah guna meningkatkan pendapatannya. Pajak dalam di kaitakan dengan pajak usaha wisata yang meliputi pajak pajak tempat tempat hiburan baik itu hotel, restoran, café maupun tempat-tempat hiburan lain nya yang bisa memberikan kontribusi besar bagi pemasukan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pariwisata tersebut karena itulah pajak merupakan factor penting yang bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pendapatan asli daerah tersebut.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Menurut Huda (2009) dalam penelitian yang berjudul "Analisis Penerimaan Devisa Sektor Pariwisata dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jawa Timur". Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan

variabel jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah hotel, biro perjalanan, rata-rata lama tinggal, rata-rata pengeluaran wisatawan dan *Kurs* Dollar AS sebagai variabel independen sedangkan penerimaan devisa sektor pariwisata sebagai variabel dependen. Dari pengujian hipotesis dengan uji F dinyatakan bahwa secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan dari pengujian hipotesis dengan t dinyatakan bahwa variabel bebas yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan devisa sektor pariwisata hanya variabel jumlah obyek wisata.

2. Penelitian oleh Anggraini (2004) dengan judul penelitian “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DKI Jakarta”. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan jumlah kunjungan wisman sebagai variabel dependen dan investasi sektor perhotelan, jumlah biro perjalanan wisata, nilai tukar, dan faktor keamanan sebagai variabel independen. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang diduga berpengaruh nyata secara bersama-sama terhadap variabel dependen pada taraf nyata 0,01 sehingga model tersebut layak untuk menduga parameter jumlah kunjungan wisman dengan tingkat kepercayaaan sebesar 99 persen. Berdasarkan hasil uji t, investasi sektor perhotelan dan jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan wisman pada tarafnya 0,01 dan kondisi keamanan berpengaruh pada tarafnya 0,05

dengan arah negatif pada saat kondisi tidak aman. Sedangkan variabel nilai tukar tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah kunjungan wisman.

3. Penelitian yang hampir serupa seperti penelitian-penelitian yang di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Sumual (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Manado”. Analisis yang digunakan metode ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana *Ordinary Least Square*. Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel dan Variabel dependent Penerimaan Pajak Daerah maka digunakan data sekunder yang bersumber dari kantor Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011 dalam kuartalan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wenagama (2013) dalam penelitian tentang “Pengaruh Jumlah Kunjungan dan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali Tahun 1996 – 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan pengeluaran wisatawan mancanegara terhadap PDRB dengan menggunakan analisis jalur. Hasil pengujian analisis jalur menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh positif dan

nyata terhadap pengeluaran wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh positif dan nyata terhadap PDRB Provinsi Bali dan pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh secara simultan terhadap PDRB, secara tidak langsung jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap PDRB melalui pengeluaran wisatawan.

5. Menurut penelitian Widiyanto (2013) dengan judul penelitian tentang “Analisis Optimalisasi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pajak hotel dan retribusi objek wisata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata.
6. Penelitian yang dilakukan Satrio (2002) dengan judul penelitian “Perkembangan Pendapatan Pemerintah Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Blora dan Faktor yang Mempengaruhinya”. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendapatan pariwisata sebagai variabel dependen dan empat variabel independen yaitu jumlah rumah makan, jumlah sarana angkutan, jumlah pengunjung obyek wisata, jumlah kamar hotel dan dana pengembangan. Dari hasil uji

signifikansi diperoleh bahwa tiga variabel yaitu jumlah rumah makan, jumlah sarana angkutan dan jumlah pengunjung obyek wisata berpengaruh positif terhadap pendapatan pariwisata pada taraf signifikansi 5 persen dan variabel jumlah kamar hotel dan dana pengembangan berpengaruh negatif.

C. Hipotesis

1. Diduga jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008-2015.
2. Diduga jumlah objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008-2015.
3. Diduga jumlah usaha wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008-2015.
4. Diduga pajak usaha wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008-2015.

D. Model Penelitian

Di dalam kerangka berpikir ini dapat di gambarkan bahwa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.



